

PENGGELAPAN DALAM JABATAN OLEH KEPALA UNIT BANK BUMN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 JO UNDANG-
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

Nama : Nova Adelina Winata

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing : 1. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan dapat terjadi dalam lingkup BUMN. BUMN yang sebagian besar modalnya dari keuangan Negara, sehingga pegawai BUMN yang melakukan tindak pidana yang merugikan BUMN dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Pegawai BUMN adalah orang yang menerima gaji dari korporasi yang menggunakan modal negara. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan AL yang melakukan penggelapan dalam jabatan di bank BUMN dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. AL sebagai kepala unit perbankan di bank BUMN melakukan tindak pidana dengan menyalahgunakan jabatannya sehingga menyebabkan bank BUMN tempatnya bekerja mengalami kerugian, sehingga atas perbuatannya AL dapat dikenakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata kunci : tindak pidana korupsi, penggelapan dalam jabatan, bank BUMN.

EMBEDDING IN POSITION BY THE HEAD OF STATE-OWNED ENTERPRISE
BANK UNIT IN TERMS OF LAW NO 31 OF 1999 JO LAW NO 20 OF 2001 ON
THE ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION

Name : Nova Adelina Winata

Dicipline/Study Programme : Law/Law

Contributor : 1. Dr. Suhartati, S.H., M.Hum.

2. Anton Hendrik Samudra, S.H., M.H.

ABSTRACT

Corruption is a crime that is detrimental to state finances and can occur within the scope of state-owned enterprise. State-owned enterprise whose capital is mostly from state finances, so that state-owned enterprise employees who commit crimes that harm state-owned enterprise can be subject to criminal liability. State-owned enterprise employees are people who receive salaries from corporations that use state capital. This writing aims to analyze whether the actions of AL who commit embezzlement in positions in state-owned banks can be subject to criminal liability in terms of Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption. AL as the head of the banking unit in a state-owned bank committing a criminal act by abusing his position, causing the state-owned bank where he works to suffer losses, so that for his actions, AL may be subject to Article 8 of Law Number 31 of 1999 jo Law Number 20 of 2001 on the Eradication of Criminal Acts of Corruption.

Key word : corruption crime, embezzlement in office, state-owned bank.